



PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DI DESA BOYOU KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI

Sri Lestari¹, Ni Luh Titi Indayani²

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tompotika Luwuk

Email : srilestari.vira77@gmail.com, niluhyani48@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan program peningkatan kapasitas perangkat desa dengan penerapan teori penguatan kapasitas yang mencakup tiga pilar utama: *Peningkatan SDM, Pendidikan dan Pelatihan, serta Kompetensi Dasar*. Landasan teoritis merujuk pada definisi kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dibutuhkan perangkat desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis secara kualitatif dengan studi kasus pada beberapa perangkat desa yang telah melaksanakan program tersebut. Hasil menunjukkan bahwa : *Peningkatan SDM* : Perangkat desa yang mengikuti program merasa mengalami perbaikan pemahaman organisasi, manajemen pemerintahan dan pengelolaan sumber daya manusia. *Pendidikan dan Pelatihan* : Pelatihan teknis seperti pengelolaan keuangan, administrasi desa, penggunaan teknologi informasi, serta pelatihan *soft skills* seperti komunikasi, perencanaan, dan manajemen sangat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. *Kompetensi Dasar* : Kompetensi Dasar perangkat desa termasuk penguasaan administrasi desa, sistem informasi, kemampuan menyusun program pembangunan, dan penganggaran menjadi lebih terarah setelah pendampingan teknis dan bimbingan terus-menerus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pelatihan serta evaluasi hasil kegiatan. Temuan utama mengungkapkan adanya kendala seperti kurangnya motivasi peserta yang telah memiliki masa kerja lama dan minimnya evaluasi pasca pelatihan.

Kata kunci: Program, Peningkatan, Perangkat Desa

Abstract

This study aims to understand the implementation of the village apparatus capacity building program by applying the capacity building theory, which includes three main pillars: Human Resource Development, Education and Training, and Basic Competencies. The theoretical basis refers to the definition of capacity as the abilities, skills, attitudes, and values needed by village apparatus to carry out government functions and public services effectively. The research method uses a descriptive qualitative analysis approach with case studies of several village officials who have

implemented the program. The results show that: Human Resource Development: Village officials who participated in the program felt that they had improved their understanding of organization, government management, and human resource management. Education and Training: Technical training such as financial management, village administration, use of information technology, as well as soft skills training such as communication, planning, and management are very helpful in improving the efficiency, transparency, and accountability of village administration. Basic Competencies: The basic competencies of village officials, including mastery of village administration, information systems, the ability to develop development programs, and budgeting, became more focused after technical assistance and continuous guidance. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation of training and activity outcome evaluations. Key findings revealed obstacles such as a lack of motivation among participants who had been working for a long time and a lack of post-training evaluation.

Keywords: Program, Improvement, Village Officials

Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik ditingkat lokal. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, perangkat desa dituntut memiliki kapasitas yang memadai baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Oleh karena itu, pelaksanaan program peningkatan kapasitas perangkat desa menjadi sebuah keharusan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Kebijakan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang mengubah kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelum kebijakan Dana Desa ini diberlakukan, terdapat kebijakan lain yang pada dasarnya bertujuan untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, Kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru yang merupakan hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan (Jamaludin, et al, 2018).

Perangkat desa memegang peran penting dalam pengelolaan sarana prasarana. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur desa berfungsi dengan baik, aman, dan dapat mendukung aktivitas masyarakat. Namun, keterbatasan kapasitas dan pengetahuan sering kali menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas ini secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan sarana prasarana menjadi kebutuhan yang mendesak (Chandra, 2017).

Langkah ini bertujuan menciptakan perangkat desa yang lebih kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya (Yunus & Sani, 2017). Peningkatan kapasitas ini bermanfaat bagi perangkat desa dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan keteguhan dalam mengelola sarana prasarana serta melaksanakan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif (Labola, 2019). Peningkatan kapasitas perangkat desa tidak dimulai dari awal, tetapi didasarkan pada kemampuan yang sudah ada. Melalui pembelajaran dan kegiatan lain, diharapkan perangkat desa dapat meningkatkan kualitas

mereka dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi (Diwanti, Pikanthi, & Kandiyah, 2020).

Melalui Dana Desa yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk desa, maka pertanggungjawaban pengelolaannya sama dengan lembaga lain yang menggunakan keuangan negara, yaitu APBN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Evaluasi menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan Dana Desa. Evaluasi diperlukan untuk memastikan agar pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan (Muslihah, et. al, 2019).

Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan dan seringkali menjadi obyek penelitian, lokasi penelitian yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah Desa Boyou merupakan salah satu desa dari 2 kelurahan dan 9 desa yang ada di Kecamatan Luwuk Utara yang dimana objek penelitian berada. Berdasarkan lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa sedangkan objek penelitian adalah Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. Informan dalam penelitian ini adalah para Perangkat Desa dan masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini jumlah informan keseluruhan adalah 10 informan dan adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling* dalam mengambil informan. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Sugiyono (2022).

Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil Penelitian terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai. Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam peningkatan kapasitas perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam konteks peningkatan kapasitas perangkat desa lebih merujuk ke peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Kompetensi Dasar dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa. Untuk penjelasan di atas yang kemudian di perkuat pada hasil wawancara mendalam kepada informan yang terkait dalam penelitian ini :

Gambaran Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai

Program peningkatan kapasitas perangkat desa di Desa Boyou dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme Perangkat desa. Program ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai, bekerja sama dengan pendamping desa serta lembaga pelatihan teknis. Kegiatan yang telah dilakukan mencakup pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES, bimbingan teknis perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes), serta sosialisasi regulasi tentang tugas dan fungsi perangkat desa. Program ini

menyasar seluruh perangkat desa, baik pejabat struktural seperti Sekdes, Kaur, Kasi, maupun operator dan staf teknis.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam memperkuat kapasitas perangkat desa untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik memerlukan kompetensi yang memadai untuk menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Kualitas SDM yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja perangkat desa dalam tugas dan fungsinya. Namun demikian, dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia begitu penting dalam pelaksanaan tupoksi dalam peningkatan kapasitas perangkat desa.

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Ketua BPD, terbukti bahwa peningkatan sumber daya manusia perangkat desa merupakan kebutuhan mendesak dan strategis, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kemampuan perencanaan menjadi prioritas tertinggi menurut mayoritas informan. Namun, kendala utama bersifat sistemik yang memerlukan pendekatan komprehensif dan koordinasi multi-stakeholder. Terdapat juga komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung program peningkatan kapasitas perangkat desa secara optimal.

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan perangkat desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan di tingkat desa. Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Adanya aspek Pendidikan dan Pelatihan menyatakan bahwa tupoksi masing-masing sesuai dengan jabatan yang diemban. Namun, terdapat beberapa perangkat desa yang masih merasa kurang percaya diri dalam melaksanakan tugas karena keterbatasan penguasaan teknis, terutama dalam hal administrasi dan penggunaan teknologi informasi. Informan pada umumnya mengakui bahwa pelatihan yang diberikan berdampak positif terhadap pelaksanaan tupoksi mereka. Perangkat desa menjadi lebih terampil dalam menyusun laporan, mengelola dana desa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ada catatan bahwa materi pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Kompetensi Dasar

Pengembangan kompetensi dasar ini dapat dilakukan melalui pelatihan bertahap, mulai dari orientasi dasar bagi perangkat desa baru, pelatihan teknis sesuai bidang tugas, hingga pelatihan lanjutan untuk peningkatan kapasitas. Program mentoring dan coaching yang dibidangnya juga dapat mempercepat kompetensi. Evaluasi berkala terhadap penguasaan kompetensi perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program peningkatan kapasitas.

Dari kesimpulan di atas yakni terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat desa di desa boyou telah berjalan sesuai aturan dasar UU No 6 tentang Desa,

namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal kompetensi dasar administrasi dan teknis. Program peningkatan kapasitas perangkat desa terbukti bermanfaat, tetapi efektivitasnya lebih optimal jika materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, metode penyampaian lebih aplikatif, dan pelaksanaan lebih rutin.

Hasil Pembahasan Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa berdasarkan tiga indikator:

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sebagian besar perangkat desa mengaku bahwa peningkatan SDM berdampak pada perubahan sikap kerja, terutama dalam hal kedisiplinan dan etika pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya merata. Beberapa perangkat desa masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan, terutama di tingkat kepala dusun.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan peningkatan SDM harus lebih personal, terarah, dan dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini menyatakan bahwa pengembangan SDM tidak cukup hanya melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui pembiasaan perilaku dan pembinaan berkelanjutan.

Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan data observasi dan dokumentasi, pelatihan tersebut memberikan pemahaman baru terutama bagi perangkat desa yang belum memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan atau keuangan. Peserta pelatihan merasa lebih percaya diri dalam menyusun laporan keuangan, membuat dokumen perencanaan, dan menggunakan aplikasi desa.

Namun, terdapat tantangan teknis seperti keterbatasan fasilitas belajar, kurangnya alat bantu teknologi, serta rendahnya kehadiran peserta pada sesi pelatihan tertentu. Ini memperlihatkan perlunya jadwal pelatihan yang lebih fleksibel dan penggunaan metode pembelajaran yang menarik dan kontekstual.

Penguatan Kompetensi Dasar

Kepala desa menyatakan bahwa masih diperlukan penguatan dalam memahami aturan teknis penggunaan dana desa dan dalam menangani aduan masyarakat secara prosedural. Ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar masih perlu ditingkatkan secara lebih sistematis. Bahwa kompetensi tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga meliputi nilai, sikap, dan motivasi kerja. Maka itu, penguatan kompetensi dasar harus dilakukan tidak hanya melalui pelatihan, tapi juga melalui penilaian kinerja dan evaluasi berkala.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program

Beberapa hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan program di Desa Boyou, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan yang beragam di kalangan perangkat desa menyebabkan kesenjangan dalam penyerapan materi.
- b. Keterbatasan anggaran desa untuk mendanai pelatihan lanjutan atau studi banding.
- c. Rendahnya motivasi sebagian perangkat desa yang melihat pelatihan sebagai formalitas, bukan kebutuhan.
- d. Fasilitas belajar yang terbatas, seperti kurangnya akses internet atau sarana komputer.

Upaya Strategis Pemerintah Desa

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa Boyou telah melakukan upaya

antara lain:

- a. Menjalin kerja sama dengan kecamatan dan pendamping desa untuk mengadakan pelatihan non-formal.
- b. Mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk kegiatan penguatan kapasitas SDM.
- c. Menjadwalkan kegiatan pelatihan secara bergilir agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
- d. Memberikan penghargaan non-materi (seperti apresiasi publik) kepada perangkat desa yang aktif belajar.

Analisis Keterkaitan Tiga Indikator

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga pilar (SDM, pendidikan/pelatihan, dan kompetensi dasar) saling berkaitan erat. Tanpa peningkatan SDM, pelatihan menjadi tidak efektif; tanpa pelatihan yang baik, kompetensi dasar tidak berkembang; dan tanpa kompetensi, pelayanan kepada masyarakat menjadi lemah. Dengan demikian, program peningkatan kapasitas perangkat desa harus dirancang secara terintegrasi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Sinergi antara ketiga pilar menjadi kunci untuk menciptakan perangkat desa yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Program peningkatan kapasitas perangkat desa meskipun belum sepenuhnya optimal. Program ini mencakup pelatihan teknis, sosialisasi regulasi, serta pembinaan etika kerja bagi seluruh perangkat desa. Dari indikator Sumber Daya menunjukkan adanya peningkatan sikap kerja dan kedisiplinan perangkat desa. Namun, penguatan aspek soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi publik masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk Pendidikan dan Pelatihan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan teknis perangkat desa, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan. Namun, keterbatasan fasilitas dan tingkat partisipasi peserta menjadi tantangan tersendiri dalam efektivitas pelatihan. Sedangkan dari segi Kompetensi Dasar menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa memahami tugas pokok dan fungsinya, tetapi masih ada kendala dalam penguasaan teknologi informasi dan pemahaman regulasi secara mendalam.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

Sugiyono(2020) tentang *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta.*

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Chandra, A. (2017). Kemampuan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang. *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan.*

Diwanti, Pikanthi, D., & Kandiyah, N. (2020). Pengaruh Capacity Building Terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*
Jamaluddin, Yanhar. et al. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Vol.6 No.1.*

- Labola, Y. (2019). Konsep pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, bakat dan ketahanan dalam organisasi. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*.
- Muslihah, S., Siregar, H. O., & Sriniyati. 2019. Dampak alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, Vol.7 No.1, July 2019, 85-93.
- Yunus, M., & Sani, K. R. (2017). The capacity building of local government in Sanjai village, Sinjai regency. Bandung Islamic University.